

ABSTRAK

India menjadi salah satu negara dengan keberadaan pekerja anak tertinggi di dunia. Berbagai upaya penanganan telah dilakukan pemerintah India termasuk kerja sama dengan organisasi internasional seperti *International Labour Organization* (ILO) dan *United Nations Children Fund* (UNICEF). Pada pemerintahan perdana menteri ke-14 India, Narendra Damodardas Modi menerapkan sebuah reformasi ambisius melalui Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak yang mengizinkan anak-anak di bawah 14 tahun untuk bekerja pada bisnis keluarga. Keputusan ini tetap dijalankan di tengah kritikan oleh para aktivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Narendra Damodardas Modi dalam upaya penanganan pekerja anak di India pada tahun 2014 hingga 2023, dengan menggunakan teori instrumen kebijakan dari Schneider dan Ingram meliputi 5 instrumen yaitu otoritas, insentif, kapasitas, simbolik dan hortatory, serta pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan serta analisa data yang digunakan melalui eksplanatif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penanganan pekerja anak pada era perdana menteri Narendra Damodardas Modi memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dibandingkan pemerintah sebelumnya. Hal ini dilihat melalui pemberlakuan amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 2015 maupun Undang-Undang Pekerja dan Remaja Tahun 1986. India juga berhasil meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Kebijakan tersebut juga didukung dengan berbagai bentuk kerja sama antar pihak pemerintah dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah seperti ILO, UNICEF, dan organisasi masyarakat yang memperjuangkan hak anak di India.

Kata Kunci: Pekerja Anak, Kebijakan, Instrumen Kebijakan, India.

ABSTRACT

India is among the countries with the highest incidence of child labour globally. The Indian government has undertaken various measures to address this issue, including collaboration with international organisations such as the International Labour Organization (ILO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF). During the administration of India's 14th Prime Minister, Narendra Damodardas Modi, an ambitious reform was implemented through an amendment to the Child Labour Act, permitting children under the age of 14 to work in family businesses. This decision has been upheld despite criticism from activists. This study aims to analyse Narendra Damodardas Modi's policies in addressing child labour in India from 2014 to 2023, using Schneider and Ingram's policy instruments theory, which includes five instruments: authority, incentives, capacity, symbolic and hortatory, and learning. This research employs a qualitative methodology, with data collected through literature review and analysed using qualitative explanatory methods. The study found that child labour policies during Narendra Damodardas Modi's tenure as Prime Minister showed better progress compared to previous administrations. This progress is evidenced by the implementation of amendments to the Juvenile Justice Act of 2015 and the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act of 1986. Additionally, India successfully ratified ILO Convention No. 138 (1973) concerning the Minimum Age for Admission to Employment and ILO Convention No. 182 (1999) concerning the Worst Forms of Child Labour. These policies are also supported by various forms of collaboration between government agencies and non-governmental organisations, such as the ILO, UNICEF, and advocacy groups championing children's rights in India.

Keywords: Child Labor, Policies, Policy Instruments, India.